

# ANALISIS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE

*Analysis Of Swallow's Nest Tax Collection Supervision In The City Of  
Parepare*

**Burhan<sup>1</sup>, Muh. Hariansyah<sup>2</sup>, Muh. Rifqi<sup>3</sup>, Amira Isnaeny<sup>4</sup>, Nurhaliza<sup>5</sup>, Andi  
Nurwanah<sup>6</sup>**

**Email:**[burhankhang58@gmail.com](mailto:burhankhang58@gmail.com)<sup>1</sup>, [ariaksa002@gmail.com](mailto:ariaksa002@gmail.com)<sup>2</sup>, [rifqisyam00@gmail.com](mailto:rifqisyam00@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[amiraisnaeny27@gmail.com](mailto:amiraisnaeny27@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurhaliza750@gmail.com](mailto:nurhaliza750@gmail.com)<sup>5</sup>, [andi.nurwanah@umi.ac.id](mailto:andi.nurwanah@umi.ac.id)<sup>6</sup>

Kampus Pascasarjana UMI

Jln. Urip Sumoharjo. Km. 4. Makassar Sulawesi Selatan

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengumpulan sarang burung walet di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi dalam penelitian ini adalah kepala bidan dan tenaga kependidikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sistem pemungutan pajak sarang burung walet yang digunakan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan dalam rangka, melaporkan, menghitung dan membayar pajak yang terutang namun pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Parepare belum berjalan karena kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, menghitung, dan membayarnya.

Berdasarkan hasil penelitian *assesment* lapangan, menunjukkan bahwa potensi bangunan yang teridentifikasi sebagai penyedia tempat bersarangnya burung walet sudah tersebar di empat kecamatan yaitu Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat. Penyebaran ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak sarang burung walet cukup tinggi. Hal ini terlihat dari perkembangan wajib pajak (WP) Sarang burung walet pada tahun 2015 hanya sebanyak 20 WP namun di tahun 2018 sudah mencapai 70 WP kemudian di tahun 2019 yaitu sebanyak 82 WP dan ditahun 2020 yaitu sebanyak 86 WP jadi dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah wajib pajak terjadi peningkatan.

**Kata Kunci: Analisis, Pengawasan, Penagihan Pajak**

## Abstract

*This study aims to look at the process of collecting swallow's nests in Parepare City based on Regional Regulation of Parepare City No. 1 of 2014 concerning Tax on Swallow's Nests. And to see how the collection of swallow's nest tax in Parepare City is in accordance with Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning Swallow's Nest Tax. Data techniques used in this study were interviews, observation and documentation. The information in this study is the head of the midwife and education staff. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The swallow's nest tax collection system used by the City Government of Parepare is Self Assessment, in which taxpayers are given in order to report, calculate and pay taxes owed but the implementation of tax collection in Parepare City has not been running because of the awareness of taxpayers in reporting their taxes, calculating, and pay for it.*

*Based on the results of the field assessment research, it shows that the potential of the buildings identified as providers of swiftlet nesting sites has spread across four sub-districts, namely Soreang, Ujung, Bacukiki and West Bacukiki. This distribution shows that the potential for swallow's nest tax revenue is quite high. This can be seen from the*

*development of the Swiftlet's Nest taxpayer (WP) in 2015, only 20 WP, but in 2018 it has reached 70 WP, then in 2019 there are 82 WP and in 2020, there are 86 WP, so it can be concluded that from 2018 -2020 the number of taxpayers has increased.*

**Keywords: Analysis, Supervision, Tax Collection**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah. Dalam pajak daerah terdapat berbagai macam jenis pajak, satu diantaranya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Pemungutan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeteir* (fungsi anggaran) dimana Negara mengandalkan sumber penerimaannya dari pungutan pajak dengan maksud utamanya untuk mengisi kas Negara. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. Keberadaan burung walet (*Collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (*Bird Nest*) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi kesehatan tubuh, pada saat itu sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan *system self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Siahaan (2009) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu, *Collocalia Fuchliap Haga*, *Collocalia Maxina*, *Collocalia Esculanta Dan Collocalia Linchi*. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami. Habitat alami adalah meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi dan gua alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat. Di luar habitat alami adalah meliputi bangunan, rumah dan atau gedung. Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah ditetapkan sebesar 10%.

Usaha sarang burung walet ini sudah terdapat di berbagai macam kota atau daerah, satu diantaranya adalah Kota Parepare, melihat banyaknya pengusaha yang mengusahakan dan membudidayakan sarang burung walet, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Setiap peraturan dibentuk untuk dipatuhi. Melihat Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet sepertinya proses dan pelaksanaan pemungutan pajak dari Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena masih ada beberapa masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif Kualitatif bagaimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu data berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil dan pembahasan penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah Kepala Bidang yang terkait langsung dengan proses Pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet kota parepare. Adapun Dari wawancara yang saya dapatkan dari kepala bidang Pendapatan yaitu,

*“Pemungutan pajak sarang burung walet Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self asesment dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanyamengandalkan kejujuran dari wajib pajak”.*

Kepala bidang menambahkan bahwa,

*“Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, pemungutan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dia tidak berpatokan pada berapa jumlah sarang yang dihasilkan tapi berdasarkan hasil jual beli sarang burung walet, dan hasil dari jual beli tersebut dikenai pajak 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan”*

Berikut pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yaitu :

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) pemungutan tidak dibayarkan secara langsung melainkan dibayar setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Pembayaran pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *self assesment* yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Sedangkan maksud dari Pasal 8 ayat (3) wajib pajak membayar sendiri pajaknya yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil *assesment* lapangan, menunjukan bahwa potensi bangunan yang teridentifikasi sebagai penyedia tempat bersarangnya burung walet sudah tersebar di empat kecamatan yaitu Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat. Penyebaran ini menunjukan bahwa potensi penerimaan pajak sarang burung walet cukup tinggi. Hal ini terlihat dari perkembangan wajib pajak (WP) Sarang burung walet pada tahun 2015 hanya sebanyak 20 WP namun di tahun 2018 sudah mencapai 70 WP kemudian di tahun 2019 yaitu sebanyak 82 WP dan ditahun 2020 yaitu sebanyak 86 WP jadi dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah wajib pajak terjadi peningkatan.

### Saran

Saran yaitu perlu diadakan sosialisasi untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan pada para pengusaha sarang burung walet agar mereka mengerti akan pentingnya peran mereka dalam perekonomian daerah dalam hal pembayaran pajak, dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak sarang burung walet

### DAFTAR PUSTAKA

- Arie,Vicky,Frangky. 2017. *“Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*. Di Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa.
- Bharata Wira Risma,Maulida Amrina. 2020. *“Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Magelang”*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Magelang.
- Erani, Nabila, Arif. 2020. *“Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*.Universitas Airlangga.
- Hendra,Claudia,Cindy. 2019. *“Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017”*. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
- Heryandika,Medya Bayu. 2016. *“Strategi Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Dikabupaten Sambas Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas”*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara
- Laut Togar Lorentino,Panggiarti Endangkartini,Indrawati Rita Lucia. 2017. *“Persepektif Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”*. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan.
- Mahfuz,Edy. 2019. *“Analisis Perkembangan Dan Upaya Peningkatan Serta Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Murung Raya”*.Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi,Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Mardiana. 2017. *“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dikabupaten Musi Banyuasin”*. Jurnal ACSY Politkenik Sekayu.
- Nasir,Safar Muhammad. 2019. *“Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah”*.Universitas Ahmad Dahlan.
- Nurlaila. 2016. *“Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- Ramadhani,Ernita. 2018. *“Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”*. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rizki,Firda Fairus. 2015. *“Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”*.Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Wahyuni,Tri. 2015. *“Tingkat Efektivitas Efisiensi Penghasilan Pajak Daerah Beserta Peran Serta Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang (2010-2013)”*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Zulkarnain, Arodhiskara Yadi. 2017. *“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Parepare”*. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo.